

MENINGKRIKISI PERISTIWA G30S 1965: DOMINASI WACANA SEJARAH ORDE BARU DALAM SOROTAN

Oleh: Andi Suwirta *)

Pemilihan dan penyajian materi sejarah Indonesia kontemporer pada masa Orde Baru (1968-1998) sangat didominasi oleh penguasaan kognitif negara terhadap masyarakat. Interpretasi terhadap fakta dan peristiwa sejarah – terutama yang berkaitan dengan peran-peran yang telah dimainkan oleh tokoh yang sedang berkuasa – diseragamkan sedemikian rupa sehingga tidak ada ruang sedikitpun bagi anggota masyarakat yang kritis untuk mendialogkannya dalam wacana publik. Materi sejarah Indonesia kontemporer, dengan demikian, sering juga dianggap sebagai sejarahnya orang yang sedang berkuasa.

Tulisan singkat ini ingin mendiskusikan salah satu peristiwa dalam sejarah Indonesia kontemporer yang masih mengandung kontroversi, yaitu Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau sering disingkat G30S 1965. Usaha untuk mendiskusikan peristiwa ini perlu karena sebagian besar dokumen penting dan rahasia tentang peristiwa G30S 1965 itu belum terbuka, maka menjadi terbuka pula

*) **Drs. Andi Suwirta, M.Hum.** adalah staf pengajar di Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia (UPI); dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI. Menyelesaikan pendidikan S-1 di Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Bandung pada tahun 1989; dan pendidikan S-2 di Program Studi Ilmu Sejarah Pascasarjana UI Jakarta pada tahun 1996, dengan menulis tesis berjudul: *Suara dari Dua Kota: Revolusi Indonesia dalam Pandangan Surat Kabar Merdeka (Jakarta) dan Kedaulatan Rakjat (Yogyakarta) 1945-47* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2000).

ANDI SUWIRTA,
*Mengkritisi Peristiwa G30S 1965:
Dominasi Wacana Sejarah Orde Baru dalam Sorotan*

bagi siapapun untuk memaknai dan memahami peristiwa itu sesuai dengan perspektif yang dianutnya.

Versi Dominan dan Versi Tandingan

Masyarakat pada umumnya dan komunitas pendidikan di tingkat persekolahan pada khususnya memiliki persepsi dan interpretasi yang relatif seragam dalam melihat peristiwa G30S 1965. Peristiwa itu, yang ditandai oleh pembunuhan para Jendral TNI AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat), jelas didalangi oleh PKI (Partai Komunis Indonesia). Dengan menyebar isu adanya Dewan Jendral yang akan melakukan kup terhadap Presiden Soekarno, PKI berhasil membujuk para perwira menengah dalam TNI AD yang dinilai “kiri” untuk menculik para jendral itu. Dengan cara seperti itu, demikian buku sejarah di tingkat persekolahan menyatakan, maka PKI bisa berbuat “lempar batu sembunyi tangan”. Sehingga, pada gilirannya nanti, PKI dapat menguasai Indonesia dan menggantikan ideologi Pancasila dengan komunisme.¹

Bahwa PKI merupakan dalang utama dibalik peristiwa G30S 1965 itu, jelas merupakan versi pemerintah Orde Baru yang disosialisasikan sedemikian rupa kepada masyarakat – termasuk kepada dunia pendidikan – baik melalui pidato resmi pejabat, buku-buku, film, dan media massa lainnya. Versi itu, sebenarnya, merupakan hasil rekonstruksi dari seorang sejarawan militer, (Kolonel) Nugroho Notosusanto, dan seorang militer yang meminati hukum, (Letnan Kolonel) Ismail Saleh, yang disusun sejak tahun 1968 dan sangat berkepentingan dengan eksistensi dan legitimasi pemerintah Orde Baru.² Hampir selama 30 tahun dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di tingkat persekolahan,

¹ Lihat, misalnya, Dodi R. Iskandar, *Penuntun Pelajaran PSPB SMA Kelas III* (Bandung: Ganeca Exact, 1988), hlm.13-35; dan I Wayan Badrika, *Sejarah Nasional Indonesia dan Umum Jilid 3: Untuk SMU Kelas 3* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1997, ed.kedua), hlm.37-41.

² Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, *Tragedi Nasional: Percobaan Kup G30S/PKI di Indonesia*, Terjemahan (Jakarta: PT Intermedia, 1990, cet.kedua).

ANDI SUWIRTA,
*Mengkritisi Peristiwa G30S 1965:
Dominasi Wacana Sejarah Orde Baru dalam Sorotan*

didominasi oleh interpretasi versi pemerintah Orde Baru dalam memaknai peristiwa itu sehingga – oleh pemerintah – peristiwa itu lebih dipopulerkan menjadi “G30S/PKI” atau “Gestapu PKI”.³

Namun setiap ada dominasi makna dari negara akan muncul pula penolakan makna secara kritis oleh sebagian anggota masyarakat. Dalam hal ini komunitas sejarawan akademis dan iluwan sosial lainnya yang kritis termasuk ke dalam anggota masyarakat yang menolak dominasi negara dalam memaknai peristiwa G30S 1965 itu.⁴ Hal itu dilakukan semata-mata untuk mencari dan menemukan kebenaran ilmiah dari suatu peristiwa sejarah yang sebenarnya kompleks. Dan karena kompleksitasnya itulah maka sebuah peristiwa sejarah tidak semestinya dimaknai dan diinterpretasi secara sederhana dengan pandangan yang determenistik.⁵ Hanya saja, sayangnya, mengingat komunitas akademisi yang kritis itu jumlahnya tidak banyak dan biasanya bersemayam di Perguruan Tinggi, yang juga tidak sepenuhnya bebas karena dominasi pemerintah, maka makna tandingan dalam mengkritisasi peristiwa G30S 1965 itu seperti tenggelam dalam “gelombang samudera makna” yang dominan versi pemerintah Orde Baru.

Hingga kini, interpretasi terhadap peristiwa G30S 1965 itu cukup beragam. Selain versi pemerintah Orde Baru, yang disebutkan di atas, paling tidak ada empat versi lain dalam memaknai peristiwa itu. Semua versi yang akan dijelaskan di bawah ini ditunjang oleh fakta, data, dan argumentasi yang logis dan rasional. Sangat boleh jadi fakta dan datanya sama, namun cara melihat dan memaknainya yang berbeda. Untuk kepentingan

³ Lihat juga buku putih versi pemerintah Orde Baru, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya* (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1994, cet.kedua).

⁴ Lihat Taufik Abdullah, “Perdebatan Sejarah dan Tragedi 1965”, *Makalah Kunci* dalam Seminar Pra KIPNAS-MSI dengan tema Memandang Tragedi Nasional 1965 Secara Jernih (Serpong, Jawa Barat: Kampus Puspistek, 8 September 1999).

⁵ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm.211-14; dan Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Jakarta: Ditjendikti-Depdikbud, 1996), hlm.160-61.

ANDI SUWIRTA,
Mengkritisi Peristiwa G30S 1965:
Dominasi Wacana Sejarah Orde Baru dalam Sorotan

analisa dan memperkaya khasanah pemikiran sejarah kita, ada baiknya versi-versi “tandingan” dalam sejarah G30S 1965 itu diperkenalkan di sini.

Pertama, versi para akademisi dari Universitas Cornell, Amerika Serikat, yang kemudian terkenal dengan sebutan *Cornell Paper*.⁶ Menurut versi ini, peristiwa G30S 1965 jelas merupakan masalah intern dalam tubuh AD, khususnya kelompok militer yang berasal dari Divisi Diponegoro, Jawa Tengah. Peristiwa itu, menurut *Cornell Paper*, lebih merupakan revolusi perwira menengah (Mayor, Letnan Kolonel, dan Kolonel) yang berasal dari Divisi Diponegoro terhadap para perwira tinggi AD (Brigjen, Mayjen, Letjen, dan Jendral) yang juga berasal dari Divisi Diponegoro. Ketidakpuasan para perwira menengah terhadap para perwira tinggi AD itu menyangkut nilai-nilai, etika, dan semangat revolusi '45 dimana kesederhanaan, kejujuran, solidaritas, kesetiaan, dan nilai-nilai hidup ideal lainnya merupakan tolok ukur utama bagi perwira sejati di manapun dan kapan pun ia berada.

Dalam pandangan para perwira menengah, para perwira tinggi AD itu – setelah pindah ke ibukota Jakarta – pola hidupnya sudah menyimpang dari nilai-nilai '45. Hal itu dipertegas oleh pernyataan Letkol Untung sendiri, setelah ia berhasil membentuk dan mengumumkan adanya Dewan Revolusi pada tanggal 1 Oktober 1965, bahwa tujuan G30S adalah: [...] *untuk mengikis habis pengaruh Dewan Jendral dan kakitangannya dalam AD. [...] yang gila kuasa, yang menterlantarkan nasib anak buah, yang di atas tumpukan penderitaan anak buah hidup bermewah-mewah dan berfoya-foya, menghina kaum wanita, dan menghambur-hamburkan uang negara [...]*.⁷ Dengan begitu, demikian *Cornell Paper*, disangsikan bahwa PKI merupakan dalang utama dalam peristiwa G30S 1965 mengingat posisi partai ini

⁶ Lihat Benedict R.O'G. Anderson and Ruth T.Mc Vey, *A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia* (Ithaca, New York: Cornell University, 1971).

⁷ Alex Dinuth (Peny.), *Salinan Dokumen Terpilih Sekitar Pemberontakan G30S/PKI* (Jakarta: Lemhanas, 1993), hlm.20. Cetak miring dari AS.

ANDI SUWIRTA,
*Mengkritisi Peristiwa G30S 1965:
Dominasi Wacana Sejarah Orde Baru dalam Sorotan*

sudah sangat diuntungkan oleh sistem politik Demokrasi Terpimpin dan gagasan NASAKOM-nya Soekarno.

Kedua, versi dari seorang sejarawan Barat, Antonie C.A. Dake, yang menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan dalang utama dari peristiwa G30S 1965 itu adalah Presiden Soekarno sendiri.⁸ Bahwa AD selalu berseteru, baik secara diam-diam maupun terang-terangan, dengan Presiden Soekarno sudah menjadi rahasia umum sejak zaman revolusi Indonesia. Jendral Soedirman sendiri, panglima TNI pada masa revolusi, sudah menunjukkan perilaku politiknya yang dalam banyak hal bertentangan dengan pemerintah dan politisi sipil, termasuk dengan Presiden Soekarno sendiri.⁹ Begitu juga dengan perilaku politik para perwira TNI AD pada tahun 1950an dan awal tahun 1960an, acapkali bertentangan dengan kepemimpinan dan kepentingan politik Presiden Soekarno.¹⁰

Dalam hal ini ketika Presiden Soekarno melakukan politik konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964, secara diam-diam AD termasuk yang menolaknya.¹¹ Sebagai panglima tertinggi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), sesuai dengan konstitusi UUD 1945, Presiden Soekarno merasa perlu “menjewer” para jendral AD yang membangkang itu. Itulah sebabnya Soekarno “merestui” tindakan Letkol Untung untuk “mengamankan” para Jendral AD pada 30 September 1965. Soekarno juga pada tanggal 1 Oktober 1965 berada di daerah Halim, tempat para pelaku utama G30S itu bermarkas. Dan ketika Brigjen Soepardjo, salah seorang pelaku utama G30S 1965, melaporkan bahwa para Jendral AD itu sudah “dibereskan”, Soekarno segera memeluk perwira tinggi itu

⁸ Lihat Antonie C.A. Dake, *In the Spirit of the Red Banteng, Indonesian Communists between Moscow and Peking 1959-1965* (The Hague, Paris: Mouton & Co, 1973).

⁹ Salim Said, *Genesis of Power: General Sudirman and the Indonesian Military in Politics, 1945-49* (Singapore, Jakarta: Institute of Southeast Asia Studies, Pustaka Sinar Harapan, 1992), hlm.37-53.

¹⁰ Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI*, Terjemahan (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1986).

¹¹ J. Soedjati Djwandono, *'Konfrontasi' Revisited: Indonesia's Foreign Policy Under Soekarno* (Jakarta: CSIS, 1996), hlm.212.

ANDI SUWIRTA,
*Mengkritisi Peristiwa G30S 1965:
Dominasi Wacana Sejarah Orde Baru dalam Sorotan*

dengan menepuk-nepuk punggungnya.¹² Dalam setiap kesempatan, setelah peristiwa G30S itu berlalu, Soekarno menyatakan bahwa peristiwa itu merupakan “riak kecil dalam sebuah gelombang samudera revolusi Indonesia yang dahsyat”. Soekarno juga tidak menunjukkan sikap empati atas kematian para jenderal AD dengan tidak menghadiri prosesi pemakamannya dan tidak mau mengutuk PKI sebagai dalang utama peristiwa itu sebagaimana dituntut oleh pihak AD.

Ketiga, versi dari seorang sosiolog dan sejarawan Belanda, W.F. Wertheim, yang menyatakan bahwa dalang dari peristiwa G30S 1965 itu adalah Jendral Soeharto.¹³ Hal itu dibuktikan, menurut Wertheim, bahwa ketiga pelaku utama G30S yaitu Kolonel Untung, Letkol Latief, dan Syam Kamaruzaman adalah bekas anak buah dan teman baik Soeharto sejak zaman revolusi Indonesia. Ketika Untung melangsungkan pernikahannya pada tahun 1950-an, Soehartolah yang bertindak sebagai walinya. Soeharto pula yang didatangi oleh Latief, pada tanggal 30 September 1965, yang melaporkan akan adanya G30S walaupun dalam perkembangan kemudian Soeharto membantahnya.¹⁴ Sementara itu Syam Kamaruzzaman juga dianggap sebagai intel “dwi-fungsi” yang melayani kepentingan intelejen baik untuk PKI maupun AD. Bahkan menurut Wertheim, tokoh intel ini sengaja disusupkan oleh

¹² Tindakan Soekarno pada tahun 1965 ini mengingatkan kita pada perilaku Jendral Soedirman pada tahun 1946 yang segera memeluk dan menepuk-nepuk punggung Mayor A.K. Joesoef setelah perwira muda itu melapor bahwa Perdana Menteri Sjahrir, yang pada waktu itu sedang berada di Solo, Jawa Tengah, sudah berhasil “diamankan” (maksudnya telah diculik dan dibawa ke suatu tempat tertentu). Selanjutnya lihat Ben Anderson, *Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*, Terjemahan (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1980).

¹³ W.F. Wertheim, “Suharto and Untung Coup, The Missing Link”, *Journal of Contemporary Asia*, No.1 (Winter, 1970).

¹⁴ Lihat Soeharto, *Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya: Otobiografi seperti Dipaparkan kepada G. Dwiipayana dan Ramadhan K.H.* (Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada, 1989), hlm.118; dimana Soeharto menyatakan bahwa ia memang melihat Letkol Latief pada malam itu tetapi tidak membicarakan sesuatu. Dalam kesempatan lain malah Soeharto menyatakan bahwa Latief bermaksud memata-matai dia dan akan membunuhnya.

ANDI SUWIRTA,
Mengkritisi Peristiwa G30S 1965:
Dominasi Wacana Sejarah Orde Baru dalam Sorotan

AD untuk memprovokasi tindakan PKI yang sudah lama menjadi musuh AD.¹⁵

Keempat, versi dari seorang mantan pejabat intelejen Amerika Serikat, Peter Dale Scott, yang menyatakan bahwa peristiwa G30S 1965, yang pada gilirannya menjatuhkan Presiden Soekarno itu, didalangi oleh CIA (*Central of Intelligence Agency*).¹⁶ Menurut P.D. Scott, sejak Soekarno mengemukakan gagasan tentang perlunya sistem politik Demokrasi Terpimpin (1956), meminta bantuan Uni Sovyet untuk membebaskan Irian Barat (1962), membetuk poros Jakarta-Peking-Pyongyang dan melakukan konfrontasi dengan Malaysia (1964), Amerika Serikat tidak senang dengan tindakan-tindakan Soekarno yang ingin menjadi pemimpin baru bagi negara-negara Asia, Afrika, dan Latin Amerika itu.

Ketidaksenangan Amerika Serikat itu nampak dari dukungan dan bantuan yang diberikan kepada para pemberontak PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) di Sumatera dan PERMESTA (Perjuangan Semesta) di Sulawesi yang menentang pemerintah pusat (Presiden Soekarno) pada tahun 1957/1958.¹⁷ Sementara Soekarno menyatakan “*go to hell with your aids*” kepada Amerika Serikat pada tahun 1960-an, negeri Paman Sam itu malah memberikan bantuan logistik, persenjataan, pendidikan, dan latihan kepada para perwira AD secara rahasia.¹⁸ Bahkan bantuan logistik dan keuangan itu nampak jelas ketika AD dan mahasiswa anti komunis pada tahun 1966 melakukan unjuk kekuatan untuk memberantas PKI di satu sisi, dan menentang kepemimpinan Presiden Soekarno di sisi lain. Hal itu diakui secara terus terang oleh Marshall Green, duta besar Amerika Serikat pada waktu itu.¹⁹

¹⁵ Sebagaimana dikutip oleh Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*, Terjemahan (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1986), hlm.116.

¹⁶ Peter Dale Scott, *CLA dan Penggulingan Sukarno*, Terjemahan (Yogyakarta: Lembaga Analisis Informasi, 1999).

¹⁷ Audrey R. Kahin dan George McT. Kahin, *Subversi sebagai Politik Luar Negeri: Mengungkap Keterlibatan CIA di Indonesia*, Terjemahan (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1997).

¹⁸ *Ibid.*, hlm.295-301.

¹⁹ Lihat Marshall Green, *Dari Sukarno ke Soebarto: G30S-PKI dari Kacamata Seorang Duta Besar*, Terjemahan (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1992), hlm.61-75.

ANDI SUWIRTA,
*Mengkritisi Peristiwa G30S 1965:
Dominasi Wacana Sejarah Orde Baru dalam Sorotan*

Dari penjelasan di atas, lantas pendapat dan perspektif mana yang paling benar? Mungkin tidak ada yang paling benar dan tidak ada yang salah sama sekali. Peristiwanya begitu kompleks dan para pelaku yang terlibat dalam peristiwa itu demikian banyak. Mengutamakan peran tokoh tertentu akan berarti mengabaikan peran tokoh yang lain, padahal sama pentingnya. Dalam hal ini pendapatnya M.C. Ricklefs, sejarawan *Indonesianist* dari Australia, dalam menanggapi peristiwa G30S 1965 itu penting juga disimak bahwa:

Oleh karena rumitnya situasi politik, hubungan-hubungan [...] dan perasaan-perasaan benci yang mempertalikan sebagian besar para pelaku utamanya satu sama lain, serta sifat yang mencurigakan dari sebagian besar bukti-bukti, [maka] tidak akan pernah diketahui kebenaran yang sepenuhnya. *Tampaknya mustabil bahwa hanya ada satu dalang yang mengendalikan semua peristiwa itu, dan tafsiran-tafsiran yang berusaha menjelaskan kejadian-kejadian tersebut secara [tunggal] itu harus dipertimbangkan secara hati-hati.*²⁰

Penjelasan yang relatif memuaskan pemahaman kita tentang peristiwa G30S 1965 adalah apa yang kemudian dikenal dengan “Teori Konspirasi”. Ada banyak pihak yang bermain dan banyak kelompok yang berkepentingan dengan peristiwa itu. Dan dalam peristiwa G30S 1965 itu, sebuah peristiwa yang paling tragis dan berdarah sepanjang sejarah Indonesia modern,²¹ kemenangan nampaknya berpihak pada Soeharto dan Angkatan Darat yang kemudian segera membentuk pemerintah Orde Baru. Sebagai sebuah regim yang lahir dari peristiwa G30S 1965, maka pemerintah Orde Baru – dalam perkembangan selanjutnya – merasa perlu dan berkepentingan dengan “tafsir sejarah yang benar dan tunggal” menurut perspektif pemerintah yang sedang berkuasa.

²⁰ Lihat M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, Terjemahan (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), hlm.427. Cetak miring dari AS.

²¹ Robert Cribb (Ed.), *The Indonesian Killings of 1965-1966: Studies from Java and Bali* (Australia, Victoria, Clayton: Monash Papers on Southeast Asia No.21, Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1990).

Catatan Akhir: Perspektif Pendidikan

Masalahnya adalah bahwa dunia ini tidak mesti dilihat secara hitam-putih. Begitu juga dalam melihat dan memaknai peristiwa sejarah. Pandangan yang lebih bernuansa, nampaknya, akan mencerahkan pikiran kita agar lebih kreatif, kaya, dan dewasa. Sudah lama pikiran dan persepsi kita tentang sejarah dikonstruksi oleh dominasi negara. Sehingga yang terjadi adalah pandangan, persepsi, interpretasi, dan makna tunggal yang serba hitam-putih. Pandangan seperti itu, tentu saja, membosankan, kering, dan tidak menantang kreativitas peserta didik. Padahal salah satu tujuan pendidikan sejarah di tingkat persekolahan adalah agar peserta didik memiliki pemikiran yang kreatif, inovatif, dan berwawasan luas.²²

Mengajarkan Peristiwa G30S 1965 perlu disesuaikan dengan perspektif ilmu sejarah yang terus berubah. Tafsir tunggal atas suatu peristiwa hanya akan menjadikan kita terjebak pada determinisme sejarah yang tidak perlu dan, secara sadar atau tidak, hanya menguntungkan kepentingan politik golongan tertentu dalam masyarakat. Sepanjang tafsir kita terhadap peristiwa sejarah itu didukung oleh data, fakta, dan argumentasi yang logis dan rasional, mengapa kita tidak mencobanya untuk memberikan penjelasan dan analisa dalam perspektif yang “lain”? Bukankah sejarah itu, pada intinya, merupakan proses kesinambungan dari interaksi antara sejarawan dan fakta-fakta yang dimilikinya, suatu dialog yang tidak berkesudahan antara masa sekarang dengan masa lampau.²³ Hal itu berarti, sebagai implikasinya, pemahaman dan pemaknaan kita terhadap sejarah akan terus berubah sesuai dengan tuntutan dan jiwa zamannya.

²² Said Hamid Hasan, “Tujuan Pendidikan Sejarah di SMA”, *Makalah* (Yogyakarta: Seminar Sejarah Nasional, 1985).

²³ E.H. Carr, *What is History* (England, New York: Penguin Books, 1982, reprinted), hlm.30.

ANDI SUWIRTA,
*Mengkritisi Peristiwa G30S 1965:
Dominasi Wacana Sejarah Orde Baru dalam Sorotan*

Hanya saja, memang, mengajarkan sejarah di tingkat persekolahan itu perlu juga sikap bijak dan pertimbangan yang matang. Menyajikan materi sejarah dengan aneka tafsir yang *njlimet* dan rumit hanya akan membingungkan peserta didik dan, barangkali, tidak sesuai dengan psikologi perkembangan anak. Menjadi tugas pendidik, tentunya, untuk menyederhanakan, menseleksi, dan memberi makna yang sesuai dengan perkembangan, kepentingan, minat, dan kemampuan peserta didik. Jikalau tulisan ini memberikan kesadaran kepada pendidik bahwa pengetahuan sejarah yang dimilikinya tidak sama dengan peserta didik, sebagaimana yang tertuang dalam buku-buku teks resmi sekolah, maka sebagian dari tujuan tulisan ini telah tercapai.